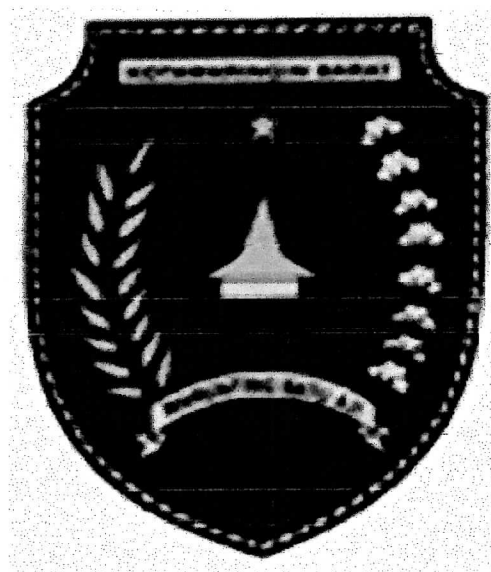


**PERUBAHAN RENCANA KERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(RENJA SKPD)
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

TAHUN ANGGARAN 2019



**KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
KECAMATAN PANGKALAN BANTENG**

Jl. Ahmad Yani KM. 68 Telp. (0532) 2033700 Fax. (0532) 2033562
KARANG MULYA 74183

@ Juni 2019

KATA PENGANTAR

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 yang diamanatkan dalam pasal 150 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah., bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut harus saling bersinergi mulai dari RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD dan Renja SKPD. Salah satu dokumen dimaksud yang langsung disusun sesuai tupoksi SKPD dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah adalah Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019. Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2019 berdasarkan prioritas RKPD tahun 2019 dan Renstra Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2017-2022.

Demikian Perubahan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

Katang Mulya, Juni 2019



Drs. EDIE FAGANTI
Pembina IV/a
NIP. 19650802 199403 1 010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun serta berfungsi sebagai penjabaran dari RKPD dan Renstra SKPD yang sifatnya lebih operasional.

Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi SKPD

Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu wilayah kerja perangkat daerah, sebagaimana ketentuan menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019 mengakomodir adanya dinamika dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Pangkalan Banteng selama bulan Januari 2019 sampai dengan Juni 2019 sehingga diperlukan perubahan rencana kegiatan 2019.

Selain perencanaan, yang tidak kalah penting adalah mengetahui karakteristik wilayah (komparatif dan kompetitif advantied) yang dimiliki oleh kecamatan. Karena itu, Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai salah satu kecamatan yang berada pada posisi strategis dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi serta berada di daerah perbatasan, mencitrakan diri pada posisi sebagai "Kota Perbatasan Pencitraan Kabupaten". Maknanya adalah masyarakat dari wilayah lain akan melihat riil Kotawaringin Barat Pangkalan Bun ada pada Kecamatan Pangkalan Banteng.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Undang – undang No. 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 ayat (1) bahwa “Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia”. Perencanaan Pembangunan Nasional menghasilkan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP);
- b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah;
- c. Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Tahunan Nasional merupakan dokumen perencanaan nasional dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang selanjutnya di sebut Rencana Kerja Pemerintah, sedangkan Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Dalam penjelasan UU. 25 Tahun 2004 Pasal 21 ayat (3) dikatakan bahwa “Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan berpedoman pada Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4).

Dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber dana pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan :

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 disusun sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Kecamatan

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Banteng disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan, serta sistematika penulisan;
- BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II, berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra SKPD, Analisis Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Riveuw terhadap Rancangan Awal RKA-SKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, berisi tentang Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD, Program dan Kegiatan;
- BAB IV : PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2019

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II

Pelaksanaan Renja Kecamatan Pangkalan Banteng pada tahun 2019 terkait dengan target dan realisasi capaian dapat dilihat secara umum pada tabel berikut:

Tabel. 2.1
Realisasi Anggaran serta Kinerja Output dan Outcome
Kantor Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2019

No.	Program dan Kegiatan	Input			Output			Outcome			
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)	Uraian	Real.	Sat.	Uraian	Real.	Sat.	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran										
a.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	77.940.000	30.441.313	39,06 %	Sarana komunikasi dan penerangan	12	Bulan	Tercapainya pemakaian sarana komunikasi dan penerangan yang maksimal	100	%	
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.852.536	0	0%	Perpanjangan STNK kendaraan bermotor	8	Unit	Perpanjangan STNK Kendaraan dinas/ operasional	100	%	
c.	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	119.914.000	49.071.015	40,92 %	Jasa administrasi keuangan	12	bulan	Kegiatan administrasi keuangan dapat terselenggara dengan baik	100	%	
d.	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	69.866.000	31.508.000	45,10 %	Jasa kebersihan kantor	12	bln	Kebersihan kantor yang terpelihara	100	%	

e.	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	9.250.000	0	0%	Jasa perbaikan peralatan kerja	21	Unit	Peralatan kerja yang siap digunakan - Komputer 10 Unit - Note Book 5 Unit - Printe 8 Unit	100	%
f.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	23.593.000	23.593.000	100 %	Tersedianya alat tulis kantor	37	Jenis	Tersedianya alat tulis kantor	100	%
g.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.000.000	7.491.700	62,43 %	Barang cetakan dan penggandaan	12	bln	Tersedianya barang cetakan, penggandaan	100	%
h.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.496.445	2.432.000	97,42 %	Komponen instalasi listrik/penerangan kantor	7	Jenis	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan	100	%
i.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.764.250	59.295.500	99,22 %	Peralatan dan perlengkapan kantor	13	Unit	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100	%
j.	Penyediaan Makanan dan Minuman	25.000.000	16.100.000	64,40 %	Makanan dan minuman rapat	10	kali	Tersedianya makanan dan minuman rapat	100	%
k.	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	196.050.000	71.675.640	36,56 %	Koordinasi dalam daerah dan keluar daerah	658	kali	Tercapainya koordinasi ke kepala desa dan instansi vertikal di kec. P. Banteng	100	%
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
a.	Pembangunan Gedung Kantor	186.000.000	57.169.000	30,74 %	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun	1	Unit	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100	%
b.	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	24.000.000	0	0%	Tersedianya Perlengkapan gedung kantor	2	Unit	Jumlah dan Jenis perlengkapan gedung Kantor yang diadakan	100	%
c.	Pengadaan Peralatan Rumah	29.301.750	0	0%	Tersedianya Peralatan	7	Unit	Jumlah dan Jenis Peralatan Rumah Jabatan/Dinas yang disediakan	100	%

Jabatan/ Dinas				Rumah Jabatan/ Dinas								
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	5.277.125	0	0%	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	8	Jenis	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang disediakan	100	%			
e. Pengadaan Meubelair	6.000.000	0	0%	Tersedianya Meubelair Gedung Kantor	2	Bh	Jumlah dan Jenis Meubel yang di adakan	100	%			
f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan	12.730.000	0	0%	Terpeliharanya Rumah Dinas/ Jabatan	1	Unit	Terpeliharanya Rumah Jabatan dengan Baik	100	%			
g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	77.859.894	0	0%	Terpeliharanya Gedung Kantor	4	Unit	Terpeliharanya Gedung Kantor dengan Baik	100	%			
h. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	20.500.000	0	0%	Jumlah dan Jenis Kendaraan yang di Perihara	9	Unit	Terpeliharanya Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Kecamatan	100	%			
i. Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	8.440.000	0	0%	Jumlah dan Jenis Perlengkapan yang di Perihara	13	Unit	Terpeliharanya Jumlah dan Jenis Perlengkapan	100	%			
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur												
a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	12.500.000	12.500.000	100%	Pakaian dinas beserta perlengkapannya	26	Stel	Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya	100	%			
b. Pengadaan Pakaian Hari-hari tertentu	7.700.000	7.700.000	100%	Pakaian Olah Raga	22	Stel	Tersedianya Pakaian Hari-hari tertentu	100	%			

4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
a.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	61.400.000	41.461.373	67,53 %	Bimtek untuk pegawai	7	Ok	Bimtek untuk pegawai	100 %
5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan									
a.	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	22.850.000	19.684.500	86,15 %	Laporan capaian kinerja dan iktisat realisasi kinerja SKPD	1	Dokumen	Pemenuhan laporan keuangan akhir tahun	100 %
6 Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pembangunan Kesejahteraan Rakyat Serta Ketrampilan Ketertiban Umum Di Kecamatan									
a.	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	5.500.000	4.210.000	76,55 %	Jumlah Pelayanan yang diberikan	100	Dokumen	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi/Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masy. Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketertiban Umum	100 %
b.	Pembinaan Tata Kelola Pemerintahan Desa/ Kelurahan	6.000.000	3.000.000	50%	Persentase Desa yang di Bina	80	Persen	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi/Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masy. Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketertiban Umum	100 %
c.	Pembinaan dan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan	6.000.000	6.000.000	100%	Jumlah Desa/ Kelurahan yang di Fasilitasi	17	Desa	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi/Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masy. Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketertiban Umum	100 %
d.	Pembinaan Ketrampilan dan Ketertiban Umum	5.500.000	4.000.000	72,73 %	Jumlah Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	70	Laporan	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi/Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masy. Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketertiban Umum	100 %

e.	Pembinaan Kesejahteraan Rakyat	6.000.000	6.000.000	100%	Persentase Penduduk Miskin	50	Persen	Persentase Rekomendasi hasil Koordinasi Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelayanan Umum, Pemberdayaan Masy. Desa, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta Ketertiban Umum	100	%
----	--------------------------------	-----------	-----------	------	----------------------------	----	--------	---	-----	---

Dari total anggaran tersebut diatas, yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan 6 (Enam) sasaran strategis adalah **Rp. 1.102.000,00** dan realisasi penyerapan pembiayaan sasaran sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp. 453.333.042** atau **41,13 %** yang berarti masuk dalam kategori capaian **"Cukup"**.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Pangkalan Banteng secara definitif diresmikan oleh Bupati Kotawaringin Barat pada Tanggal 23 Desember 2004 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 10 Tahun 2003 Tanggal 14 Juni 2003.

Luas wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng : 1.371 KM2 dengan jumlah desa pada awal pembentukan sebanyak 13 Desa. Pada tahun 2010 dimekarkan 4 (empat) desa baru yaitu Desa Berambai Makmur, Desa Karang Sari, Desa Sungai Pulau dan Desa Sungai Pakit.

Distribusi jumlah penduduk dan luas wilayah masing-masing desa dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 4.2
Distribusi Penduduk Desa
Di Kecamatan Pangkalan Banteng

No.	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah
		KK	Laki-laki	Perempuan	
1.	Amin Jaya	1.976	4.497	3.976	8.473
2.	Arga Mulya	584	1.004	861	1.865
3.	Berambai Makmur	223	420	369	789
4.	Karang Mulya	1.054	1.837	1.713	3.550
5.	Karang Sari	211	377	345	722
6.	Kebun Agung	370	686	662	1.348
7.	Marga Mulya	462	867	748	1.615
8.	Mulya Jadi	266	514	464	978
9.	Natai Kerbau	506	730	782	1.512
10.	Pangkalan Banteng	425	914	757	1.671
11.	Simpang Berambai	605	1.021	961	1.982
12.	Sido Mulyo	634	1.008	929	1.937
13.	Sungai Bengkuang	734	1.557	1.356	2.913
14.	Sungai Hijau	684	1.109	1.023	2.132
15.	Sungai Kuning	558	677	584	1.261

16.	Sungai Pakit	829	1.621	1.463	3.084
17.	Sungai Pulau	196	315	286	601
	Jumlah	10.317	19.154	17.279	36.433

Sumber: Laporan Penduduk Kecamatan Pangkalan Banteng Bulan Mei 2019

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat terbagi secara alamiah sesuai dengan letak geografis.

1. Desa Karang Mulya dan Desa Amin Jaya, secara umum kegiatan ekonomi masyarakat bergerak disektor perdagangan dan jasa.
2. Desa Mulya Jadi, Desa Natai Kerbau, Desa Pangkalan Banteng dan desa-desa sekitarnya, kegiatan ekonomi masyarakat sebagian besar berfokus pada kegiatan perkebunan dan sebagian pertanian tanaman pangan.
3. Desa - desa PIR dengan pusat pengembangan di Desa Sidomulyo, arah pengembangan ekonomi masyarakat yaitu pada sektor perkebunan dengan komoditas utama karet dan ditunjang dengan pengembangan komoditas lain seperti kelapa sawit, hortikultura dan pertanian tanaman pangan.

Faktor lain yang menunjang perekonomian masyarakat adalah adanya perusahaan-perusahaan besar swasta yang ada di wilayah Kecamatan Pangkalan Banteng, diantaranya:

1. Perusahaan perkebunan kelapa sawit:
 - a. PT. Gunung Sejahtera Puti Pesona (GSPP)
 - b. PT. Gunung Sejahtera Dua Indah (GSDI)
 - c. PT. Indoturba Tengah
 - d. PT. Wanasawit Subur Lestari (WSSL)
 - e. PT. Bangun Jaya Alam Permai (BJAP)
2. Perusahaan Perkebunan Karet
 - a. PT. Perkebunan Nusantara XIII

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Tujuan dan sasaran program dan kegiatan pada perencanaan ini yaitu untuk pemenuhan kebutuhan rutin SKPD dalam menunjang pelaksanaan

penyelenggaraan fungsi Pemerintahan yang menjadi tugas dan fungsi Kecamatan dalam memberikan pelayanan kepada Masyarakat baik itu melalui pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pemenuhan kebutuhan administrasi kependudukan serta sosial kemasyarakatan dalam rangka memberikan kesejahteraan serta pembangunan kehidupan bermasyarakat seutuhnya dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kendala utama dalam penentuan angka keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang obyektif adalah karena belum adanya standar pelayanan minimal serta standar operasional prosedur. Selain itu juga disebabkan oleh:

1. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan.
2. Kemampuan dan keterampilan yang tidak merata pada setiap personil pegawai kecamatan.
3. Belum optimalnya tingkat kedisiplinan pegawai.
4. Anggaran yang disediakan belum mencukupi kebutuhan secara penuh.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, upaya yang perlu dilakukan adalah:

1. Mengoptimalkan pendayagunaan SDM dan Fasilitas yang ada serta mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana tertentu dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan;
2. Peningkatan kinerja aparatur dengan mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan dan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi SDM pegawai.
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi di tingkat pimpinan dan staf secara sinergis.
4. Penyesuaian kebijakan dan rencana program prioritas dengan kemampuan anggaran tersedia.

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

1. Geografis dan Lingkungan

- Mewujudkan Tata Ruang Kecamatan Pangkalan Banteng sebagaimana Rencana Umum Tata Ruang Kecamatan (RUTRK) Pangkalan Banteng serta secara bertahap penetapan tata batas antar desa dengan prioritas

desa-desa dalam wilayah kecamatan, tata batas dengan desa-desa di luar kecamatan dalam satu kabupaten dan dengan desa-desa di luar Kabupaten Kotawaringin Barat.

- Mendukung terciptanya lingkungan yang lestari melalui partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh industri perkebunan.

2. Perekonomian Masyarakat

- Menjaga dan memacu kegiatan ekonomi masyarakat (perdagangan dan jasa) agar tetap stabil dan bahkan meningkat.
- Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kegiatan ekonomi masyarakat melalui usulan kepada pemerintah daerah/lintas sektor terkait.
- Memberdayakan organisasi ekonomi masyarakat (Koperasi, UKD, APD, UPK-UPMB dan lain-lain) untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Kesejahteraan, Sosial Budaya dan Agama

- Mengusulkan dan memfasilitasi pembangunan fisik pendidikan dan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung.
- Mengupayakan adanya fasilitas olah raga secara terpusat di ibukota kecamatan.
- Mendukung upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata terutama keluarga miskin melalui program pemerintah yang ada.
- Mendukung terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal, baik itu yang asli setempat maupun budaya yang dibawa oleh warga masyarakat eks. Transmigrasi.
- Menjamin suasana hidup kerukunan umat beragama, memfasilitasi rumah ibadah sesuai aturan yang berlaku serta membina dan mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan.

4. Bidang Pertanian

- Mendata dan menginventarisir tanah-tanah milik warga eks. Transmigrasi berupa lahan pekarangan, lahan usaha dan lahan pangan.

- Penertiban kepemilikan/penguasaan atas tanah serta surat menyurat (administrasi pertanahan) yang dimiliki oleh masyarakat serta memfasilitasi penyertifikatan tanah masyarakat.
- Memfasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan dengan mengutamakan upaya musyawarah.
- Bersama masyarakat memfasilitasi dan memberi masukan kritis terhadap rencana penggunaan tanah untuk investasi (perkebunan, pertambangan, dan lain-lain).

5. Sektor Pertanian

- Peningkatan kelembagaan dan kemampuan petani di tingkat desa.
- Peningkatan produksi dan produktifitas pertanian tanaman pangan khususnya padi dan kedelai.
- Peningkatan kemampuan terhadap upaya pencegahan organisme pengganggu (hama) tanaman dengan melibatkan upaya kerjasama petani untuk memperkecil penggunaan racun kimiawi.
- Program Pembukaan / pencetakan sawah baru dilokasi sentra penanaman padi di Desa Natai Kerbau, Pangkalan Banteng, Marga Mulya dan Mulya Jadi.
- Mengefektifkan/optimalisasi cekdam Berambai Makmur untuk pengairan yang dibarengi dengan pembukaan areal sawah sampai batas optimal.
- Peningkatan pendapatan (hasil panen) yang terus meningkat dalam setiap musim tanam.
- Penambahan pembukaan sawah baru dengan lokasi yang potensial di Desa Berambai Makmur, Desa Marga Mulya dan Desa Pangkalan Banteng dengan dukungan instansi terkait.

6. Sektor Peternakan

- Meningkatkan produksi peternakan baik yang berupa bantuan pemerintah (dengan sistem pengguliran) dan ternak yang dikelola masyarakat secara mandiri, berupa sapi, kambing, ayam/unggas dan sejenisnya.

- Pengembangan sektor peternakan hewan ternak besar (sapi/kambing) sebagai upaya untuk menggalakkan budi daya peternakan di masyarakat.
- Mendukung pelaksanaan tugas pos check point hewan ternak yang ada di Desa Amin Jaya sebagai titik pantau masuknya hewan ternak dan unggas dari luar daerah ke Pangkalan Bun.

7. Sektor Perikanan

- Program pengembangan perikanan darat di beberapa desa potensial yaitu Desa Pangkalan Banteng dengan menggunakan sistem keramba dan kolam ikan di Desa Natai Kerbau, Mulya Jadi, Sidomulyo dan Amin Jaya.
- Pengembangan tambak untuk masyarakat dengan memanfaatkan sungai-sungai yang ada disekitar desa.
- Pengembangan budi daya kolam ikan sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat.

8. Sektor Perkebunan

- Pengembangan Pertanian dalam arti luas dengan sasaran perkebunan rakyat dengan memberdayakan lahan-lahan eks. Transmigrasi (LU. 1 dan LU. 2) dan lahan kosong yang dikelola oleh masyarakat / desa.
- Peningkatan dan pengembangan luasan perkebunan masyarakat, bekerja sama dengan perusahaan perkebunan terdekat untuk pengembangan komoditas sawit dan karet yang sudah berjalan sebelumnya (Sistem IGA / kemitraan).
- Pengembangan kebun desa dalam rangka pengelolaan TKD (Tanah Kas Desa) untuk semua desa dalam wilayah Kecamatan pangkalan Banteng.
- Pengembangan kebun rakyat dengan komoditas yang sudah dikenal seperti karet dan kelapa sawit.
- Memfasilitasi kerja sama antara masyarakat petani dengan perusahaan perkebunan swasta untuk pembukaan kebun masyarakat, bimbingan teknik dan pemasaran hasil.
- Mendukung dan menghimpun aspirasi masyarakat terhadap rencana replanting perkebunan karet plasma dengan PTPN 13 yang sampai pada

saat ini usia tanaman sudah memasuki penurunan produktifitas (sudah tua).

- Memfasilitasi pengembangan bibit terutama kelapa sawit dan karet untuk memudahkan masyarakat mendapatkan bibit yang berkualitas.

9. Bidang Pemerintahan Umum

- Menjamin terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan.
- Optimalisasi personal ability melalui pembinaan, bimbingan dan supervisi.
- Mengupayakan dan mengusulkan ke Pemerintah Daerah (dinas terkait) kelengkapan minimal baik itu personil maupun sarana/prasarana pendukung operasional kegiatan untuk staf dan fisik kantor kecamatan.
- Peningkatan pengawasan dengan sistem yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan.
- Menyusun perencanaan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan melibatkan dan mendengar aspirasi dari masyarakat.
- Pembinaan pemerintahan dan lembaga desa melalui supervisi, penyuluhan, sosialisasi dan seminasi program, kegiatan dan aturan yang terkait dengan pemerintahan desa.